



DIKBASTRA 1 (1) (2018)

DIKBASTRA : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/dikbastra>

Manifestasi Prinsip Kesantunan dan Prinsip Kerja Sama dalam Implikatur Percakapan di Sekolah

Bashori¹, Eko Kuntarto²SMPN 2 Merlung Tanjung Jabung Barat¹, MPBSI Universitas Jambi²

Email: bashoriabas9@yahoo.com

Prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Pascasarjana, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2018

Disetujui Juni 2018

Dipublikasikan Desember 2018

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penggunaan bahasa lisan dalam pergaulan di lingkungan sekolah antara siswa, guru. Fokus penelitian adalah pada ragam bahasa lisan yang mempunyai maksud tergantung konteks (*context depending*). Adapun aspek-aspek kebahasaan yang diteliti adalah manifestasi prinsip kesantunan dan prinsip kerja sama dalam implikatur percakapan pada interaksi di sekolah. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik Simak-Libat Cakap (SLC), divariasi dengan teknik catatan lapangan. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kesantunan dapat dimanifestasikan dalam jenis tindak tutur representatif, ekspresif, komisif, dan direktif, (2) Prinsip Kesantunan dan Prinsip Kerja sama dapat dimanifestasikan dalam implikatur percakapan; (3) Pada situasi percakapan dengan topik resmi, kesantunan dimanifestasikan dengan pemuatan pada prinsip kerja sama dan penggunaan implikatur; (4) Pada situasi percakapan dengan topik tidak resmi, prinsip kerjasama (PK) lebih diutamakan daripada prinsip kesantunan (PS); (5) Pada percakapan antara siswa-guru, jarak sosial dan status sosial tidak lagi menjadi pertimbangan utama untuk menyampaikan tuturan yang santun.

Kata kunci: prinsip kesantunan, prinsip kerja sama, implikatur percakapan

Abstract

This study examines the use of spoken language in the school environment among students, teachers. The focus of the research is on the variety of oral language that has context-dependent intentions (context depending). The linguistic aspects studied are the manifestation of the principle of politeness and the principle of cooperation in the implicature of conversation on the interaction in school. The technique used in data collection is the technique of Simak-Libat Cakap (SLC), varied by field note technique. The results of this study are: (1) Modesty can be manifested in representative, expressive, commissive, and directive speech acts, (2) Principle of Principle and Principle Cooperation can be manifested in conversational implicatures; (3) In conversational situations with official topics, politeness is manifested by adherence to the principle of cooperation and the use of implicatures; (4) In situations of conversations with unofficial topics, the principle of cooperation (PK) takes precedence over the principle of politeness (PS); (5) In the conversation between student-teacher, social distance and social status is no longer a major consideration for delivering a polite speech.

Keywords: principles of politeness, principles of cooperation, implicature of conversation.

PENDAHULUAN

Kajian tentang bahasa sendiri tidak lengkap tanpa mengaji percakapan yang merupakan bentuk penggunaan bahasa paling umum sekaligus begitu integral dalam pemahamannya. Hal ini ditandai dengan penutur secara tidak langsung melakukan kesepakatan dengan mitra tutur dalam memilih ujaran yang akan digunakan atau menyamakan praanggapan terlebih dahulu sehingga komunikasi menjadi lebih efektif meskipun tuturan yang digunakan tidak sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Maka dari itu, konsep tuturan dalam suatu komunikasi merupakan tataran yang sederhana, tetapi dalam pembelajaran keterampilan berbahasa sangat dibutuhkan karena menjadi rumit saat dikaitkan dengan masalah pragmatik (cara pemakaian bahasa).

Belajar bahasa diawali dengan memahami bahasa, mencoba menggunakannya, dan mempelajari bahasa saat bahasa tersebut digunakan (Rofi'uddin dan Darmayati, 2001: 143). Konsep belajar ini lebih menitik-beratkan pelaziman perilaku berbahasa dalam proses belajar mengajar bagi siswa sejak tingkat dasar. Dengan kata lain, pembelajaran berbahasa semestinya lebih mengarahkan agar siswa tidak hanya memahami tentang bahasa tetapi juga mampu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi sesuai tata krama atau kesantunan berbahasa baik secara lisan maupun tulisan. Namun yang terjadi dalam kenyataan adalah bahwa perhatian guru dalam pembelajaran berbahasa lebih pada pemahaman tentang bahasa, bukan kemampuan berbahasa. Hasil pengamatan penulis juga menunjukkan bahwa guru sebagai salah satu aktor dalam kegiatan belajar-mengajar dan pergaulan di sekolah tidak selalu memberi contoh yang baik dalam menggunakan bahasa. Hanya mestinya juga perlu mengontrol cara siswa dalam berbahasa sehingga fungsi sekolah sebagai salah satu bentuk masyarakat bahasa mampu memberikan pajanan penggunaan bahasa yang baik.

Sekolah sebagai tempat pengajaran bahasa merupakan wilayah sosial pemakaian bahasa (*societal domain*) yang mempunyai corak tersendiri. Sekolah merupakan masyarakat tutur (*speech community*) yang berbeda dengan masyarakat tutur yang lain, lengkap dengan perbedaan penutur (*speaker deferencial*) dan perbendaharaan tuturnya (*speech repor-toire*). Perbedaan tersebut tampak nyata di sekolah yang berlokasi di daerah, seperti halnya di Merlung, yang merupakan masyarakat bilingual (bahasa daerah dan bahasa Indonesia), bahkan multilingual. Efek yang timbul dalam praktik bilingual atau multilingual tersebut adalah terjadinya peristiwa sentuh atau kontak antar bahasa atau antar fariasi bahasa saat menyampaikan maksud kepada mitra tutur.

Dalam peristiwa kontak antar bahasa sering terjadi adanya saling pengaruh dan pencampuran antara bahasa tutur yang satu dengan bahasa tutur yang lainnya. Akibatnya, dimungkinkan adanya penyimpangan interpretasi maksud yang disampaikan karena perubahan bahasa (*resul-tante*) dan membuat bahasa mitra tutur bersifat purposif, yaitu respon yang menggunakan bahasa yang dikuasai dan bahasa lingkungan seka-ligus saat mengungkapkan gagasan atau pikirannya secara langsung. Peristiwa kontak antar bahasa merupakan hal kedua yang menarik untuk diteliti.

Di samping itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam proses belajar mengajar di sekolah merupakan ragam bahasa lisan yang mempunyai maksud tergantung konteks (*context depending*) tuturan sehingga dapat melahirkan persepsi yang berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan komunikasi di sekolah, siswa dan guru harus mampu menangkap maksud suatu tuturan sehingga tidak terjadi "salah persepsi" (*miss perception*). Hal ini berarti yang terpenting dalam komunikasi tidak hanya bentuk-bentuk bahasa (*lokusi*), tetapi juga apa yang "terselubung" dalam satu tindak bahasa yaitu apa yang ingin disampaikan oleh seorang penutur kepada mitra tuturnya (*ilokusi*) dan "kekuatan" bahasa untuk menyampaikan maksud (*perlokusi*). Pengetahuan pragmatik dalam arti praktis (komunikatif) dalam pergaulan di sekolah menjadi hal yang penting. Pengetahuan itu patut diterapkan oleh guru untuk membekali siswa dengan keterampilan berbahasa menurut situasi tertentu disamping teori bahasa sebagai landasan. Selain itu, interpretasi pesan dari tindak bahasa, yang dikenal sebagai implikatur percakapan, tentu saja memerlukan pengetahuan tentang prinsip kerja sama dan sopan santun yang harus dipahami penutur dan mitra tutur sebagai pengetahuan bersama (*common ground*).

Dari deskripsi di atas dapat diketahui bahwa dalam realisasi berbahasa di sekolah terdapat jurang pemisah antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Di satu sisi, guru dan siswa mestinya dalam berkomunikasi mestinya menggunakan bahasa Indonesia yang informatif, jujur, relevan dan tidak ambigu. Namun pada kenyataan, baik guru maupun siswa tidak jarang melanggar prinsip-prinsip percakapan, yaitu Prinsip Kesantunan (PS) dan Prinsip Kerjasama (PK).

KAJIAN TEORI

Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat penyampaian maksud baik berupa tuturan yang bersifat performatif maupun konstatif. Bentuk bahasa (B) adalah hasil dari pertimbangan dan penghubung situasi (S), konteks (K), dan maksud (M) atau sering

dirumuskan dengan $M+S/K=B$ saat berkomunikasi (Nababan, 1987: 8). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui pada dasarnya semua tuturan bersifat performatif yang berarti dua hal terjadi secara bersamaan ketika orang mengucapkannya. Yang pertama adalah **tindak** (*action*), dan kedua berupa **ujaran atau tuturan** yang dapat digolongkan kepada tiga kategori, yaitu **lokusi** adalah makna dasar dan makna referensi (makna yang diacu) oleh ujaran itu; **ilokusi** adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh penggunaan ujaran itu sebagai perintah, ujian, ejekan, keluhan, janji, dan sebagainya; serta yang terakhir **perlokusi** adalah hasil atau efek dari ujaran itu terhadap pendengar (penutur), baik yang nyata maupun yang diharapkan.

Secara singkat ilokusi yang tidak dikatakan penutur (n) kepada petutur (t) dan mempunyai kemungkinan lebih dari satu penafsiran disebut implikatur. Dengan kata lain, partisipan yang terlibat langsung dalam peristiwa tutur terkadang sengaja tidak memiliki kerja sama yang baik saat menyampaikan beberapa maksud tersembunyi. Meskipun demikian, implikatur merupakan sebuah proposisi yang sudah diarahkan dari tuturan yang sebenarnya telah dituturkan penutur. Untuk itu, perlu pemahaman tentang konsep implikatur, implikatur percakapan, ilokusi, penafsiran dan kendala pemakaian implikatur percakapan sebelum membahas penelitian.

Grice (1975) membedakan implikatur menjadi dua jenis yaitu implikatur konvensional dan non-konvensional. Implikatur konvensional yaitu makna ujaran yang secara umum diterima oleh masyarakat dan biasanya disebut juga dengan prinsip kerja sama yang dalam praktiknya berpegang pada empat maksim. Implikatur konvensional adalah implikatur yang bersifat umum dan konvensional sehingga semua orang sudah mengetahui maksud atau pengertian mengenai suatu hal tertentu berdasarkan konvensi yang telah ada. Selain itu, implikatur konvensional bersifat non-temporer yaitu makna atau pengertian tentang sesuatu bersifat lebih tahan lama. Jenis implikatur ini tidak banyak dikaji dan dikembangkan oleh para peneliti wacana, karena dianggap kurang menarik. Makna tuturan berimplikatur konvensional dapat dimengerti dengan jelas karena makna tuturan sama persis dengan makna unsur-unsur tuturan tersebut.

Implikatur non-konvensional (implikatur percakapan atau IP) lebih menekankan pada ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. Implikatur percakapan (IP) memiliki makna dan pengertian yang lebih bervariasi karena pemahaman terhadap hal "yang dimaksudkan" sangat bergantung kepada konteks terjadinya percakapan. Implikatur percakapan hanya muncul dalam suatu tindak percakapan (*speech act*). Karena itu,

implikatur percakapan tersebut bersifat **temporer** (terjadi saat berlangsungnya tindak percakapan), dan **non-konvensional** (sesuatu yang di implikasikan tidak mempunyai relasi langsung dengan tuturan yang diucapkan). Dengan kata lain, ketika seseorang berbicara, sesuatu yang dikatakan atau yang dituliskan tidak selalu sama dengan yang dimaksudkan karena disesuaikan dengan situasi ujar. Bahkan dapat dimungkinkan sebuah tuturan memiliki lebih dari satu implikatur karena semua penafsiran implikatur tergantung pada situasi ujar saat tuturan tersebut diujarkan.

Selain itu, implikatur percakapan bukan merupakan bagian dari tuturan karena lebih mengacu kepada jenis "kesepakatan bersama" antara penutur dan petutur, yaitu kesepakatan dalam pemahaman bahwa yang dibicarakan harus saling berhubungan. Rahardi (2008: 17) menyatakan bahwa konteks pada hakikatnya adalah latar belakang pengetahuan yang dapat dipahami penutur dan petutur, sehingga hubungan atau keterkaitan itu sendiri tidak terdapat pada masing-masing ujaran. Artinya, maksud keterkaitan itu tidak diungkapkan secara harafiah pada ujaran itu, melainkan berdasarkan kebiasaan atau pengetahuan yang sudah saling dipahami antar kedua belah pihak. Jadi, implikatur percakapan itu dapat dikatakan sejenis maksud yang terkandung dalam cakapan yang dipahami oleh masing-masing partisipan.

Dalam implikatur percakapan dapat saja ada muatan implikasi pragmatik atau implikasi sosio-kultural. Artinya, dalam satu percakapan bisa saja terkandung kedua implikasi pragmatik dan implikasi sosio-kultural sekaligus. Hal itu karena pengungkapan bahasa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-kultural pemakaian bahasa itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa implikatur percakapan merupakan salah satu gagasan terpenting dalam pragmatik. Sesingkat apapun suatu percakapan, jika terdapat satu mekanisme pemahaman yang lain di luar makna harafiah maka maksud penutur dalam implikatur tersebut dapat dimengerti, karena implikatur percakapan adalah sejumlah wujud tuturan yang realisasinya berdasarkan makna diluar bentuk linguistik atau situasi tutur baik berupa penutur, mitra tutur, konteks, waktu maupun tempat ujaran atau yang sering disebut konteks.

Konsepsi implikatur percakapan secara umum adalah sebagai berikut: (1) memberi penjelasan fungsional atas fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori-teori linguistik struktural; (2) memberi penjelasan yang tegas dan eksplisif tentang bagaimana kemungkinan pemakai bahasa dapat menangkap pesan, walaupun hal yang diucapkan secara lahiriah berbeda dengan hal yang dimaksud dapat menyederhanakan pemerian semantik dari

perbedaan hubungan antar klausa, meskipun klausa-klausa itu dihubungkan dengan kata dan struktur yang sama; dan (3) menerangkan berbagai macam fakta dan gejala kebahasaan yang secara tidak berkaitan (Levinson (1983: 97-100)).

Berdasarkan kegunaan implikatur percakapan di atas, dapat diketahui adanya kerja sama yang konstruktif antara penutur dan petutur dalam suatu percakapan. Kerja sama yang dimaksud adalah bahwa antara penutur dan petutur mengharapkan sumbangan (respon) sesuai yang diperlukan dan tingkat penerimaan yang sesuai dengan makna yang dapat diterima dan disepakati sehingga sejumlah implikasi makna tuturan dapat dipahami oleh penutur. Konsepsi inilah yang kemudian dikenal sebagai Prinsip Kerja sama (PK).

Implikatur percakapan mempunyai sifat dapat diperhitungkan, ditangguhkan, dibatalkan dan ditegaskan kembali (Yule, 2006: 78). Cummings (2007: 20-24) menyatakan, ada lima ciri implikatur percakapan. *Pertama*, daya batal (*cancellable*); dalam keadaan tertentu implikatur percakapan dapat dibatalkan oleh perubahan konteks, baik dengan cara eksplisit atau pun dengan cara kontekstual. *Kedua*, ketidakterpisahan (*nondetachable*) dengan cara mengatakan sesuatu itu sehingga orang memakai tuturan bermuatan implikatur percakapan untuk menyampaikannya sehingga sulit dipisahkan hanya dengan mengubah bentuk linguistik ujaran tersebut. *Ketiga*, implikatur percakapan mempersyaratkan pengetahuan makna konvensional dari kalimat yang dipakai terlebih dahulu, sehingga isi implikatur percakapan tidak masuk dalam makna konvensional tuturan tersebut (*nonconventional implicature*). *Keempat*, kebenaran isi implikatur percakapan tidak tergantung pada apa yang dikatakan (*calculable*/ daya nalar atau hitung). *Kelima*, implikatur percakapan tidak dapat memberi penjelasan spesifik yang pasti sifatnya (*indeterminate*), sehingga dengan keberadaan ini implikatur dalam suatu percakapan secara fungsional dapat diterangkan melalui keterbatasan pemahaman bahasa secara struktural.

Dengan demikian, setiap penjelasan tentang makna suatu tuturan harus sesuai fakta yang diamati dan sesederhana atau serampat mungkin sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Implikatur percakapan dapat memberikan penjelasan secara fungsional mengenai sejumlah fakta kebahasaan yang berkaitan dengan konteks tuturan yang mengikatnya, ditambah prinsip-prinsip bertutur seperti Prinsip Kerja sama (PK) dan Prinsip Kesantunan (PS).

Dengan demikian dapat dirumuskan suatu teori, bahwa PK menganjurkan agar komunikasi verbal dilakukan dengan bentuk yang lugas, jelas, isinya benar, dan relevan dengan konteksnya. Di lain sisi, PS menganjurkan agar komunikasi verbal dilakukan dengan

sopan, yaitu bijaksana, mudah diterima, murah hati, rendah hati, cocok, dan simpatik. Untuk menutup *gap* (jurang pemisah) di antara teori PK dan PS tersebut muncullah IP (implikatur percakapan), karena IP mampu menghadirkan sejumlah makna tuturan selain yang terungkap secara lingual (berwujud tanda/lambang) atau secara struktural. Untuk itu, dalam analisis percakapan, kecuali digunakan pendekatan pragmatik, tetapi juga diperlukan sudut pandang semantik sebagai penyalaras dengan tetap menggunakan dua prinsip pragmatik, yaitu PK dan PS.

Menurut Grice (1975), dalam komunikasi, penutur dan petutur biasanya berusaha untuk saling bekerja sama, dengan maksud agar tujuan atau pesan ujaran yang mereka tuturkan dapat dipahami oleh partisipan komunikasi. Dalam memahami percakapan diperlukan dua pokok kaidah yaitu prinsip kooperatif atau PK dan maksim percakapan. PK lebih menekankan pada penggunaan segala ujaran yang sesuai dengan tujuan percakapan yang telah disepakati atau sesuai arah percakapan yang diikuti. PK seringkali diartikan sebagai panduan umum yang melingkupi interaksi percakapan. PK membuat kontribusi peserta tutur menjadi tepat dalam sebuah percakapan; Sedangkan maksim percakapan sebagai realisasi PK terdiri dari 4 maksim.

Dengan mengadaptasi pendapat Grice (dalam Leech, 1993: 11), keempat maksim PK tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Maksim Kuantitas, deskriptornya: (a) buatlah sumbangan Anda seinformatif yang diperlukan, dan (b) jangan membuat sumbangan anda lebih informatif dari yang diperlukan; (2) Maksim Kualitas, deskriptornya: (a) jangan mengatakan apa yang anda yakini tidak benar, (b) jangan mengatakan sesuatu yang Anda tidak/ kurang mempunyai bukti; (3) Maksim Hubungan, deskriptornya: bicaralah yang relevan atau berguna; dan (4) Maksim Cara: (a) hindarilah ungkapan yang membingungkan, (b) hindarilah ambiguitas, (c) bicaralah secara singkat, (d) bicaralah secara khusus.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penutur harus menyampaikan informasi kepada petutur dengan didukung oleh data (prinsip kualitas), sesuai dengan yang diperlukan, tidak lebih dan tidak kurang (prinsip kuantitas), berkaitan dengan yang sedang dibicarakan dengan mitra tutur (prinsip relevansi), dan yang terakhir adalah prinsip cara, artinya ketika berkomunikasi dengan orang lain di samping harus ada masalah yang dibicarakan juga harus memperhatikan cara menyampaikan. Kadang-kadang ketika seseorang berkomunikasi, sebenarnya pokok masalah yang dibicarakan bagus dan menarik, tetapi jika cara menyampai-kan justru menyinggung perasaan, terkesan menggurui, kata-kata yang digunakan terasa kasar, atau cenderung melecehkan, tujuan komunikasi dapat tidak tercapai.

Salah satu pegangan atau kaidah percakapan ialah penutur menganggap penutur menaati dasar atau maksim di atas. Jika terdapat tanda-tanda ada maksim dilanggar, maka mitra tutur harus memutuskan bahwa ada sesuatu dibalik yang dikatakan penutur. Maka penuturlah yang menyampaikan maksud lewat implikatur percakapan dengan melanggar satu atau lebih maksim PK, dan penuturlah yang mengenali makna-makna yang disampaikan lewat inferensi itu. Keunggulan prinsip ini terletak pada kemampuan maksim-maksim dalam menunjukkan pembagian kerja antara *arti* suatu ujaran dengan daya sekaligus pembeda antara semantik dengan pragmatik.

Di samping kelebihan PK dalam menuntun komunikasi yang baik antara penutur dan petutur, prinsip ini juga memiliki kelemahan. Leech (1993: 12) merinci kelemahan penggunaan prinsip kerja sama dalam pragmatik antara lain: (1) Maksim berlaku secara berbeda dalam konteks penggunaan bahasa yang berbeda; (2) Maksim berlaku dalam tingkatan yang berbeda sehingga tidak ada maksim yang berlaku secara mutlak ataupun tidak berlaku sama sekali; (3) Maksim dapat bermitraan satu dengan yang lain; (4) Maksim dapat dilanggar tanpa meniadakan tindakan yang dikendalikannya.

Untuk mengatasi kelemahan PK dan menjalin hubungan yang "mesra" antara penutur (N) dan petutur (T), partisipan percakapan perlu mempertimbangkan aspek kesantunan berbahasa. Kesantunan dalam berkomunikasi dapat dipandang sebagai usaha untuk menghindari konflik antara penutur dan petutur karena lebih bersifat sosial, estetis dan moral dalam melakukan suatu percakapan. Karena itu, dalam percakapan kecuali diperlukan PK juga diperlukan PS. Menurut Leech (1993: 206), PS dapat diwujudkan dalam enam maksim sebagai berikut. *Pertama*, Maksim Kearifan (*tact maxim*), yang terdiri atas dua indikator: (a) buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin, dan (b) buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. *Kedua*, Maksim Kedermawanan (*generosity maxim*), yang terdiri atas indikator: (a) buatlah keuntungan sendiri sekecil mungkin, dan (b) buatlah kerugian sendiri sebesar mungkin. *Ketiga*, Maksim Pujian (*approbation maxim*): (a) kecamlah orang lain sedikit mungkin, dan (b) pujilah orang lain sebanyak mungkin. *Keempat*, Maksim Kerendahan Hati (*modesty maxim*): (a) pujilah diri sendiri sedikit mungkin, dan (b) kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. *Kelima*, Maksim Kesepakatan (*agreement maxim*): (a) Usahakan agar ketidaksepakatan antara diri dan orang lain terjadi sedikit mungkin, dan (b) usahakan agar kesepakatan antara diri dan orang lain terjadi sebanyak mungkin. *Keenam*, Maksim Simpati (*sympathy maxim*): (a) kurangilah rasa antipati antara diri dan orang lain sebanyak mungkin, dan (b) tingkatkan rasa simpati diri terhadap orang lain setinggi mungkin.

Inti dari prinsip sopan santun ini adalah maksim kebijaksanaan (memberikan keuntungan bagi mitra tutur), maksim kedermawanan (memaksimalkan kerugian pada diri sendiri), maksim pujian (memaksimalkan pujian kepada mitra tutur), maksim kerendahan hati (meminimalkan pujian kepada diri sendiri), maksim kesetujuan (memaksimalkan kesetujuan dengan mitra tutur), dan maksim simpati (memaksimalkan ungkapan simpati kepada penutur. Kesantunan dianggap sebagai "piranti" untuk menjelaskan alasan penutur sering bertutur secara tidak langsung (*indirect*) dalam mengungkapkan maksudnya. Motivasi penggunaan tindak tutur tidak langsung dimaksudkan agar ujaran terdengar lebih santun. Namun, perlu diketahui bahwa kesantunan suatu tuturan sangat bergantung kepada penafsiran mitra tutur, artinya ujaran yang dianggap santun oleh penutur belum tentu santun pula bagi mitra tutur.

Penilaian derajat kesantunan suatu ujaran memerlukan lima skala pertimbangan yang disebut "skala pragmatik" (Leech, 1993: 194-199). Kelima skala pragmatik itu adalah skala biaya-keuntungan (*cost and benefit*), skala pilihan (*optionality*), skala ketaklangsungan (*indirectness*), skala otoritas (*authority*), dan skala jarak sosial (*social distance*).

Pertama, skala biaya-keuntungan atau skala untung-rugi digunakan untuk menghitung biaya yang diperlukan dan keuntungan yang diperoleh penutur untuk melakukan tindakan sebagai akibat dari daya ilokusi tuturan direktif yang diperintahkan oleh penutur. Makin ke bawah ujaran ini dinilai makin santun sebab makin sedikit biaya yang diperlukan untuk melakukan tindakan tersebut dan makin banyak keuntungan yang diperoleh oleh penutur.

Kedua, skala keopsionalan digunakan untuk menghitung berapa banyak pilihan yang diberikan oleh penutur kepada mitra tutur untuk melaksanakan tindakan. Makin banyak jumlah pilihan, makin santun tindak ujaran tersebut. Banyak sedikitnya pilihan, mitra tutur dapat menilai suatu tuturan kurang santun atau lebih santun. Tuturan 'Tutuplah pintu itu!' dinilai kurang santun karena hanya memberi perintah, dan tidak memberi peluang kepada petutur untuk memilih opsi lain. Sebaliknya, tuturan "Jika tidak berkeberatan, tolonglah tutup pintu itu!" dinilai lebih santun sebab penutur memberikan pilihan kepada petutur untuk 'menutup pintu itu', yaitu bila mitra tutur berkenan (tidak keberatan). Jadi, dalam hal ini derajat kesopansantunan tuturan direktif tersebut ditentukan oleh skala pragmatik keopsionalannya.

Ketiga, skala ketaklangsungan tuturan, yakni seberapa panjang jarak yang "ditempuh" oleh daya ujaran itu untuk sampai pada tujuan ujaran. Dalam hal ini, semakin

langsung tuturan itu maka dipandang semakin kurang santun, dan sebaliknya, semakin tidak langsung tuturan itu semakin santun.

Keempat, skala otoritas yang menunjuk hubungan status sosial antara penutur dan petutur. Semakin tinggi derajat sosial penutur maka ketidaksantunan-nya akan berkurang bagi petutur. Perintah langsung tetap dipandang santun jika perintah tersebut disampaikan oleh seorang bos kepada anak buahnya. Sehingga semakin jauh jarak peringkat sosial antara penutur dengan petutur, tuturan yang digunakan akan cenderung semakin santun. Sebaliknya, semakin dekat jarak peringkat status sosial di antara keduanya, tuturan kesantunan yang digunakan cenderung akan berkurang.

Yule (2006: 104) menyebutkan bahwa dalam berinteraksi dengan menggunakan bahasa terdapat kesantunan berbahasa yang memiliki batasan kesantunan itu sendiri sebagai upaya sadar seseorang dalam menjaga keperluan wajah orang lain. Istilah kesantunan sering disebut "wajah", dalam hubungan sebagai citra diri seseorang dalam masyarakat. Aspek wajah terdiri atas *wajah positif* dan *wajah negatif*. Wajah positif mengacu kepada kebutuhan seseorang untuk dapat diterima dan disukai oleh orang lain dalam kehidupan sosial. Wajah negatif merupakan hak seseorang untuk dapat bertindak secara independen dan tidak oleh paksaan dari orang lain.

Dalam hubungan ini, apabila penutur kurang memperhatikan hal yang menjadi keinginan wajah mitra bicara, misalnya, dengan mengatakan sesuatu berupa paksaan ataupun ancaman, penutur dipandang telah melakukan suatu tindakan mengancam wajah (*face threatening act*). Yule (2006: 106) menguraikan bahwa tuturan yang disampaikan mungkin saja oleh orang lain ditafsirkan sebagai sesuatu ancaman atau paksaan terhadap wajahnya; dan apabila penutur mengantisipasi dan melakukan suatu upaya untuk mengurangi yang mungkin dianggap bersifat ancaman itu, upaya demikian disebut tindakan menjaga wajah (*face saving action*).

Peristiwa inilah yang sering disebut kesenjangan ketika berinteraksi, yakni tidak semua prinsip dan norma kesantunan itu terlaksana. Yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip sopan santun untuk menyelamatkan wajah adalah hal yang menjadi keinginan wajah negatif atau yang merupakan keinginan wajah positif. Orang yang *berwajah negatif* tidak mau terikat dan dibebani; dia cenderung memilih bebas untuk berbuat dan tidak ingin mendapat tekanan atau paksaan dari orang lain. Orang yang *berwajah positif* menginginkan dirinya dapat diterima sebagai bagian integral dari

kelompoknya serta keinginan-keinginannya diperhatikan orang lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa wajah negatif itu ialah keinginan pribadi untuk independen.

Wajah positif sebagai keinginan seseorang untuk diterima sebagai anggota kelompok masyarakat. Dengan demikian, tindak penyelamatan wajah yang orientasinya kepada orang berwajah negatif cenderung dengan penyertaan tanda hormat, menghargai waktu dan urusannya, dan terkadang malah harus disertai lebih dahulu dengan pernyataan minta maaf apabila hendak memerintahkan atau mengganggunya.

Tingkat keakraban sosial dalam masyarakat dipengaruhi dua faktor untuk menentukan pemunculan tipe kesantunan. Pertama kesantunan bertutur yang dialamatkan kepada petutur dalam rangka menjaga keinginan wajah. Kedua, kesantunan yang baru akan sangat terasa jika penutur dan mitra tutur dalam berinteraksi terkendala oleh hubungan sosialnya yang belum cukup serasi dalam masyarakat. Dalam hubungan kesantunan positif adalah menjaga atau menyelamatkan wajah positif orang lain. Orang dikatakan memiliki kesantunan positif apabila orang yang dimaksudkan memiliki siasat bertutur yang menggambarkan adanya rasa solidaritas dengan pendengarnya. Hal demikian biasanya ditandai dengan adanya penggunaan tuturan informal; misalnya dengan memunculkan ucapan yang berciri dialek ataupun bahasa *slang*, nama panggilan, dan meminta dengan cara tidak langsung.

Selanjutnya, kesantunan negatif merujuk kepada tuturan yang orientasinya menjaga atau menyelamatkan wajah negatif orang lain. Hal semacam ini biasa terjadi pada partisipan yang belum mencapai keakraban dalam interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Artinya, masih terdapat jarak sosial antara penutur dan petutur. Pada kesantunan negatif, orang menggunakan siasat bertutur yang menekankan adanya hormat dan menghargai petutur atau pendengarnya. Nama panggilan, bahasa *slang*, dan tuturan informal yang biasa digunakan dalam siasat kesantunan positif, tidak digunakan pada siasat kesantunan negatif.

Berdasar penjelasan di atas dapat disimpulkan suatu tuturan memiliki tingkat kesantunan berbeda-beda berdasarkan batasan tertentu. Semua itu pada hakikatnya dilakukan melalui sikap sadar yang ditunjukkan dalam menjaga wajah orang lain. Tujuan sikap ini penting bagi penutur yang memiliki jarak sosial dengan penutur sebagai tindakan menghargai atau hormat pada petutur atau orang lain; sedangkan sikap yang sama terhadap orang yang dirasa akrab biasanya dipandang sebagai solidaritas atau sikap bersahabat. Disinilah prinsip sopan santun penutur yang terlibat dalam interaksi perlu menyadari adanya prinsip dan norma semacam itu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Teori tersebut menjadi landasan bagi penulis dalam memahami keseluruhan data. Pelanggaran PK dapat saja terjadi karena N ingin mengejar PS. Sebaliknya, pelanggaran PS juga bisa saja terjadi bilamana N ingin mengutamakan PK. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilatarbelakangi oleh alasan-alasan pragmatik tertentu. Pada posisi ini, interpretasi terhadap PK dan PS dapat dijelaskan melalui IP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, sesuai dengan masalah penelitian dan tujuan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan baik secara kualitatif. Teknik-teknik pokok yang akan digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah simak-libat-cakap atau SLC (penyimak dan ikut berpartisipasi dalam percakapan). Untuk membantu analisis, teknik SLC dipadukan dengan teknik catatan lapangan (*field note*).

Data penelitian berujud teks percakapan, yang kemudian ditranskripsi menjadi teks tulis. Sumber data adalah percakapan guru, siswa, pegawai, dan kepala sekolah. Data lisan dikumpulkan dengan metode simak yang dibantu dengan teknik dasar sadap dan teknik lanjutan simak libat cakap. Teknik sadap digunakan untuk menyadap tuturan responden. Teknik simak libat cakap dilakukan dengan menyimak sekaligus berpartisipasi dalam pembicaraan. Peneliti terlibat langsung dalam dialog baik sebagai penutur maupun petutur.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan model analisis menurut Miles and Huberman (1994: 20). Analisis data terdiri atas langkah-langkah *data collecting* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing / verification* (penarikan kesimpulan).

Keabsahan data/ triangulasi diuji menggunakan beberapa metode, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik triangulasi. Pertama, triangulasi metode, yaitu menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yang beragam agar validitas data terjaga. Selain melalui metode SLC, peneliti juga melakukan penyimak terlibat (*participant observation*). Melalui penyimak terlibat maka diharapkan dapat dikumpulkan data alamiah yang benar-benar muncul dalam setiap latar penelitian. Kedua, triangulasi sumber data, yaitu data diperoleh dari sumber berbeda untuk mengecek kebenaran data. Sumber data utama atau

data primer diperoleh melalui penyimakan percakapan antara guru dan siswa. Sumber data sekunder diperoleh melalui wawancara baik dengan guru maupun dengan siswa. Ketiga, triangulasi teori, yaitu rumusan informasi atau *thesis statement* dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas kesimpulan yang dibuat. Triangulasi teori juga digunakan untuk meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti terhadap hasil analisis data yang telah diperoleh. Melalui berbagai perspektif atau pandangan tersebut diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Sesuai analisis data penelitian, jenis tuturan dalam wacana percakapan antara guru-siswa-pegawai-kepala sekolah di SMAN 4 Merlung yang merepresentasikan kesantunan dimanifestasikan pada kelima jenis tindak tutur (TT), yaitu:

Pertama, TT representatif (TTR), yaitu tindak tutur mengungkapkan, mengakui, menuntut, menunjukan, menyebutkan, memberikan kesaksian, melaporkan, menyatakan sesuatu hal tentang kebenaran yang dialaminya. Semua jenis TTR ditemukan dalam wacana percakapan yang diteliti, karena umumnya penutur (N) mengungkapkan, mengakui, memberikan kesaksian kepada petutur (T) secara detail dengan harapan mendapatkan respon/jawaban yang tepat atas apa yang dituturkannya.

Kedua, TT direktif (TTD). Tindak tutur ini kadang disebut juga tindak tutur impositif. TTD adalah tuturan yang dimaksudkan penuturnya agar petutur (T) melakukan tindakan yang dimaksudkan dalam tuturan itu. Dengan kata lain TTD berfungsi untuk membuat petutur (T) melakukan tindakan yang disebut penutur (N). Berdasarkan hasil analisis data, TTD yang terungkap dalam percakapan guru-siswa adalah **memaksa, mengajak, meminta, menyuruh, menagih, mendesak, memohon penjelasan, menyarankan, dan memerintah**. Sedangkan tindak tutur **memberi aba-aba** dan **menantang** tidak muncul dalam percakapan. Hal ini diduga karena maksud dari kedua tindak tutur tersebut tidak sesuai untuk konteks percakapan guru-siswa.

Ketiga, TT ekspresif (TTE). Tindak tutur ini adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujaran diartikan sebagai evaluasi. TTE yang terungkap dalam penelitian ini meliputi **mengucapkan terima kasih, memuji, mengeluh, menyalahkan, mengucapkan selamat**.

Keempat, tindak tutur komisif (TTK). Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan dalam tuturan. Hal ini

dimaksudkan agar petutur (T) melaksanakan maksud dari ujaran penutur (N). Berdasarkan asumsi-asumsi tertentu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penutur (pengetahuan latar belakang), maka petutur (T) dimungkinkan melaksanakan apa yang dituturkan oleh penutur (N). Dalam penelitian ini semua jenis TTK terungkap.

Kelima, tindak tutur deklaratif (TTL). Tindak tutur deklarasi adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. TTL dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu deklaratif untuk fungsi **mengesahkan, memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, mengabulkan, mengangkat, menggolongkan, mengampuni, memaafkan, dan mohon penjelasan, dan berkesimpulan**. Jenis-jenis TTL yang terungkap pada saat pengumpulan data, yaitu fungsi **memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, mengabulkan, menggolongkan, mengampuni, memaafkan, dan mohon penjelasan, dan berkesimpulan**. Sedangkan tindak tutur direktif untuk fungsi **mengesahkan, mengangkat, menggolongkan, dan mengampuni** tidak terungkap.

Berdasarkan analisis data, dalam situasi ujar non-formal, misalnya dalam percakapan di luar kelas memanifestasikan kesantunan melalui penggunaan implikatur, yang diwujudkan dalam bentuk tuturan tidak langsung. Cara ini dipakai jika penutur bersamsumsi bahwa tuturan langsung yang disampaikannya akan mengancam “muka”, baik muka positif (muka diri sendiri) maupun muka negatif (muka mitra tutur). Dalam implikatur terdapat maksud ujaran penutur, yaitu tuturan yang disampaikan penutur (N) perlu penjelasan yang lebih rinci agar makna ujaran dapat ditangkap dengan jelas oleh petutur (T).

Hal lain yang menarik adalah bahwa dalam percakapan yang diteliti, jarang sekali ditemukan data tentang implikatur yang dibuat oleh siswa. Mereka cenderung menggunakan ujaran langsung untuk menyampaikan maksudnya. Justru, ujaran tidak langsung, termasuk implikatur dianggap melanggar prinsip percakapan. Dari analisis data diketahui bahwa implikatur banyak dipakai dalam percakapan antara guru-kepala sekolah dan guru-guru. Dalam percakapan antara guru-siswa, maka implikatur tidak tampak menonjol. Pada contoh data terseleksi dapat diketahui bahwa para siswa kurang memahami tuturan berimplikasi. Mereka bahkan protes jika guru menggunakan tuturan berimplikasi karena mereka merasa kesulitan untuk memahami maksud tuturannya dengan baik.

Berdasarkan analisis data diketahui, bahwa implikatur yang digunakan oleh para partisipan percakapan yang diteliti pada umumnya implikatur non-konvensional. Hal ini relevan dengan pendapat Grice (1975: 43-45) bahwa implikatur dibedakan menjadi tiga

macam, yaitu implikatur konvensional, implikatur non-konvensional (implikatur percakapan), dan implikatur praanggapan.

Implikatur non-konvensional implikatur percakapan adalah implikasi pragmatis yang tersirat di dalam suatu percakapan. Implikatur percakapan merupakan implikasi pragmatis yang terkandung di dalam suatu tuturan percakapan akibat terjadinya pelanggaran prinsip percakapan.

Hasil penelitian membawa implikasi kepada pembahasan sebagai berikut. Kajian pragmatik pada umumnya terfokus pada suatu komunikasi praktis yang dipengaruhi berbagai faktor di luar bahasa. Faktor inilah yang turut memberi makna dalam proses komunikasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Yule (2006: 3-4) tentang empat definisi pragmatik, yaitu (1) bidang yang mengkaji makna pembicara; (2) bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya; (3) bidang yang melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, yang mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara; dan (4) bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu.

Pragmatik juga digunakan untuk mengkaji bahwa tuturan disampaikan lebih banyak dimengerti penutur dibandingkan hal yang dituturkan penutur, sekaligus mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Batasan tersebut sering disebut faktor-faktor penentu tindak komunikatif yang penyesuaian bentuk (bahasa) atau ragam bahasa dalam kemampuan menggunakan bahasa saat berkomunikasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa implikasi pragmatik dalam tuturan merupakan satuan pragmatik yang tersirat atau terimplikasi dalam bentuk lingual oleh penutur dalam situasi tutur. Jika dalam suatu komunikasi, salah satu partisipan tidak paham dengan arah pembicaraan, maka sering dijumpai suatu komunikasi tetap dapat berjalan dengan penggunaan bentuk yang tidak umum secara sintaksis atau semantik, yaitu implikatur percakapan (IP).

Suatu saat, karena itu partisipan ingin mengubah strategi percakapannya, yang semula tuturan langsung menjadi implikatur, dengan tujuan untuk menjaga “muka”. Pada saat lain, partisipan mengubah implikatur menjadi tuturan langsung, karena situasi ujar menghendaknya. Suatu analisis percakapan atau tuturan lebih mementingkan dimensi sosial sehingga penjelasan makna yang tidak alamiah dalam berkomunikasi tidak cukup hanya bermaksud menyebabkan efek tertentu pada penuturnya, melainkan efek ini hanya dapat dicapai jika

mitra tutur tersebut mengetahui maksud untuk menghasilkan efek itu sesuai konteks penutur dan mitra tutur (Leech, 1993:38).

Dengan berbagai alasan, implikatur justru sering disembunyikan agar hal yang diimplikasikan tidak nampak terlalu mencolok. Secara singkat pragmatik berusaha menanggulangi persoalan makna yang belum bisa terpecahkan dengan teori semantik biasa yaitu "apa yang diucapkan" terkadang berbeda dengan "apa yang diimplikasikan atau dimaksudkan". Meskipun demikian, pragmatik sebagai bidang kajian dalam linguistik masih mempunyai kaitan dengan semantik. Keterkaitan ini sering disebut semantisisme, yaitu melihat pragmatik sebagai bagian dari semantik; atau sebaliknya dengan sebutan pragmatisisme, yaitu melihat semantik sebagai bagian dari pragmatik; dan komplementarisme yaitu melihat semantik dan pragmatik sebagai dua bidang yang saling melengkapi. Karena itu, pragmatik sering disebut bidang yang mengkaji makna dalam interaksi (*meaning in interaction*) dan dibedakan menjadi dua hal yaitu: (1) pragmatik sebagai sesuatu yang diajarkan, ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pragmatik sebagai bidang kajian linguistik dan pragmatik sebagai salah satu segi di dalam bahasa; dan (2) pragmatik sebagai sesuatu yang mewarnai tindakan mengajar.

Analisis data menunjukkan bahwa para siswa SMA Negeri 4 Merlung pada umumnya suka memelihara sikap santun. Ia berbicara dengan ragam tuturan yang merepresentasikan sikap santun. Akan tetapi, mereka kurang cepat dalam memahami tuturan-tuturan yang disampaikan secara implikatif. Dengan kata lain, para siswa cenderung menggunakan tuturan yang eksplisit, tetapi tetap relevan dengan prinsip-prinsip kesantunan. Strategi yang mereka gunakan, antara lain, dengan memenuhi prinsip-prinsip kerja sama.

Berpijak pada temuan di atas, penelitian ini mengkonfirmasi pengetahuan tentang pragmatik. Pragmatik pada hakikatnya lebih mengarah pada perwujudan kemampuan pemakai bahasa untuk menggunakan bahasanya sesuai dengan faktor-faktor penentu dalam tindak komunikatif dan memperhatikan prinsip penggunaan bahasa secara tepat. Penafsiran bahasa tuturan melalui pragmatik juga akan menjadi lebih mendalam untuk mengetahui maksud, asumsi dan tujuan pembicaraan dengan berdasar hal-hal yang penutur perlihatkan (konteks) saat tuturan tersebut diujarkan. Untuk itulah, terkadang sebuah konsep tuturan cenderung tidak konsisten dan objektif saat dianalisis karena berbeda konteks maka dimungkinkan berbeda pula maksud ujaran meskipun tuturan yang diujarkan sama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disampaikan simpulan sebagai berikut. Pertama, jenis tuturan dalam wacana percakapan antara guru-siswa-pegawai-kepala sekolah di SMAN 4 Merlung yang merepresentasikan kesantunan dimanifestasikan pada kelima jenis tindak tutur (TT), yaitu: tindak tutur representatif (TTR), tindak tutur direktif (TTD), tindak tutur ekspresif (TTE), tindak tutur komisif (TTK), dan tindak tutur deklaratif (TTL). Semua jenis TTR, TTD, dan TTK ditemukan dalam wacana percakapan yang diteliti. Sedangkan jenis TTD yang terungkap adalah **memaksa, mengajak, meminta, menyuruh, menagih, mendesak, memohon penjelasan, menyarankan, dan memerintah**. Tindak tutur **memberi aba-aba** dan **menantang** tidak muncul dalam percakapan. Jenis TTE yang terungkap meliputi **mengucapkan terima kasih, memuji, mengeluh, menyalahkan, mengucapkan selamat**.

Kedua, dalam situasi ujar non-formal, misalnya dalam percakapan di luar kelas memanifestasikan kesantunan melalui penggunaan implikatur, yang diwujudkan dalam bentuk tuturan tidak langsung. Cara ini dipakai jika penutur bersamsumsi bahwa tuturan langsung yang disampaikannya akan mengancam “muka”, baik muka positif (muka diri sendiri) maupun muka negatif (muka mitra tutur). Dalam implikatur terdapat maksud ujaran penutur, yaitu tuturan yang disampaikan penutur (N) perlu penjelasan yang lebih rinci agar makna ujaran dapat ditangkap dengan jelas oleh petutur (T).

Ketiga, jarang sekali ditemukan data tentang implikatur yang dibuat oleh siswa. Para siswa kurang memahami tuturan berimplikasi Mereka cenderung menggunakan ujaran langsung untuk menyampaikan maksudnya. Justru, ujaran tidak langsung, termasuk implikatur, dianggap melanggar prinsip percakapan. Keempat, implikatur yang digunakan oleh para partisipan percakapan yang diteliti pada umumnya impikatur non-konvensional.

DAFTAR RUJUKAN

Cummings, L. 2007. *Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Grice, H.P. 1975. *Logic and Conversation*. In Peter Cole and J.L. Morgan (eds.) *Syntax and Semantics, Vol. 3: Speech Acts*, New York: Academic Press. pp. 41 – 58.

Leech, Geoffery. 1983. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Terjemahan oleh M.D.D Oka. 1993. Jakarta: Universitas Indonesia.

Levinson, S.C. (1983). *Pragmatics*. London: Cambridge University Press.

Miles, M.B, Huberman, A.M, (1994). *Qualitative data analysis, 2nd ed.* USA: Sage Publication.

Rahardi, Kunjana, 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Rofi'uddin, Ahmad, dan Zuhdi, Darmiyati. 1999. *Pendidikan Bahasa Dan Sastra. Indonesia di Kelas Tinggi*. Jakarta: Dirjen Dikti, Depdikbud.

Yule, George. 2006. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.